

RENCANA KERJA TAHUN 2026

Dinas Penanaman Modal & PTSP
Kabupaten Gresik





BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Berkelanjutan Pencapaian Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Berkelanjutan Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132)
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

50. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 48);
51. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 66);
52. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB IV
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dokumen Rencana Kerja :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
 - g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
 - h. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
 - i. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
 - j. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
 - o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;

- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik;
 - t. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
 - u. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
 - v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
 - w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
 - x. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik;
 - y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
 - z. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
 - aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
 - bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
 - cc. Kecamatan Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas;
 - ee. Kecamatan Manyar;
 - ff. Kecamatan Cerme;
 - gg. Kecamatan Benjeng;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan;
 - jj. Kecamatan Driyorejo;
 - kk. Kecamatan Wringinanom;
 - ll. Kecamatan Kedamean;
 - mm. Kecamatan Menganti;
 - nn. Kecamatan Sidayu;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah;
 - pp. Kecamatan Panceng;
 - qq. Kecamatan Bungah;
 - rr. Kecamatan Dukun;
 - ss. Kecamatan Sangkapura; dan
 - tt. Kecamatan Tambak.
- (3) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 78

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2026 merupakan dasar atau pedoman bagi rencana kerja tahun ketiga atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2026 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2026 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD) atau Gabungan SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif dari semua pihak senantiasa diharapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada masa yang akan datang khususnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gresik,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik



A.M Reza Pahlevi, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19740803 199311 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD	6
	TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	45
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	64
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	64
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	65
	3.3 Program dan Kegiatan	68
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	78

	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah	78
BAB V	: PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah	6
Tabel 2	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Guna Pencapaian Sasaran	8
Tabel 3	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2025 (triwulan III)	9
Tabel 4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	14
Tabel 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik	25
Tabel 6	Realisasi Investasi Kabupaten Gresik	22
Tabel 7	Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024	26
Tabel 8	Penerbitan Izin Tahun 2024	29
Tabel 9	Permasalahan Pembangunan berdasarkan Identifikasi	33
Tabel 10	Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026	46
Tabel 11	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Gresik	59
Tabel 12	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	64
Tabel 13	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	67
Tabel 14	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPM PTSP Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	70
Tabel 15	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berdasarkan berbagai regulasi dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang berlaku, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik tahun 2026 menjadi landasan strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global dan lokal.

Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan ekonomi, sosial dan lingkungan semakin kompleks, menuntut inovasi dan sinergi antar sektoral agar pembangunan yang dilakukan mampu memberikan manfaat luas serta berkeadilan. Oleh karena itu, pembangunan tahun 2026 difokuskan pada penguatan ekonomi daerah sebagai pusat pertumbuhan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, efisien dan terintegrasi.

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik mengacu pada Rancangan RKPD Pemerintah Kabupaten Gresik. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan Rancangan RKPD-Tahun 2026. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2026 dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

23. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 050/269/HK/437.12/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2025-2030.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2026 adalah :

1. Menjabarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada Tahun 2026.
2. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan perencanaan OPD, dalam hal ini penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2025 ini merupakan bahan finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS, RKA OPD Tahun 2026 dan DPA OPD Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hasil pelaksanaannya

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menelaah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini berisi tentang garis besar rencana program dan prioritas Perangkat Daerah dalam Renja Tahun 2026

BAB V : PENUTUP

Bab ini dijelaskan kesimpulan dari penyusunan dokumen Renja Tahun 2026 yang berisi uraian catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Evaluasi pelaksanaan kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025. Pencapaian kinerja terhadap program/kegiatan/subkegiatan dan pendapatan dapat dilihat sebagai berikut :

2.1.1 Pendapatan dan Belanja

Anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 14.496.527.706,58 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 13.548.098.756,58,- dan Belanja Modal Rp. 948.428.950,00,- sedangkan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 (sampai triwulan III) adalah sebesar Rp. 7.860.970.473,39 (58,02%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 32.600.000,- (3,48%) dari rencana. Dengan demikian, jika realisasi pendapatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 35.992.185.808,78,- maka terjadi surplus sebesar Rp. 26.351.412.706,27,- (lihat pada tabel berikut ini) :

Tabel 1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

<i>Kode Rekening</i>	<i>Uraian</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi 2025 (s.d triwulan III)</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi 2024</i>
4	PENDAPATAN	64.640.000.000	24.933.098.600,00	38,57%	50.914.068.161,36
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.640.000.000	24.933.098.600,00	38,57%	50.914.068.161,36
4.1.02	Retribusi Daerah	64.640.000.000	24.893.219.767,00	38,51%	50.383.258.170,60
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	64.640.000.000	24.893.219.767,00	38,51%	50.374.398.170,60
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0	0	0,00	2.455.145.994,00

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi 2025 (s.d triwulan III)	%	Realisasi 2024
4.1.02.03.01.0 001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0	0	0,00	2.455.145.994,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	60.000.000.000	19.858.512.617,00	33,10%	42.933.619.726,60
4.1.02.03.07.0 001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	60.000.000.000	19.858.512.617,00	33,10%	42.933.619.726,60
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	4.640.000.000	5.034.707.150,00	108,51%	4.985.632.450,00
4.1.02.03.08.0 001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	4.640.000.000	5.034.707.150,00	108,51%	4.985.632.450,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	0	39.878.833,00	0,00	530.809.990,76
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	37.173.833,00	0,00	196.527.576,76
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0	37.173.833,00	0,00	196.527.576,76
4.1.04.13.03.0 007	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan- Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0	0	0,00	188.945.518,76
4.1.04.13.03.0 016	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung- Persetujuan Bangunan Gedung	0	37.173.833,00	0,00	7.582.058,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	0	0,00	334.282.414,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0	2.705.000,00	0,00	334.282.414,00
4.1.04.14.01.0 001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0	2.705.000,00	0,00	334.282.414,00

Alokasi Anggaran Belanja Langsung yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 dalam rangka melaksanakan 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai adalah sebesar Rp. 1.441.436.306,00,- dengan rincian dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 2.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Guna
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Target Keuangan 2025	Realisasi 2025 (Triwulan III)		Ket
			(Rp)	%	
1	Meningkatkan investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis	672.256.414,00	413.927.650,00	61,57	
2	Meningkatkan kemudahan layanan investasi	769.179.892,00	268.850.317,00	34,95	
	TOTAL	1.441.436.306,00	682.777.967,00	47,37	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 2 (dua) sasaran yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) subkegiatan yang telah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik sampai triwulan III adalah sebesar 54,45 %.

Sedangkan untuk program kegiatan pendukung yang bersifat rutin berada di sekretariat. Target keuangan kegiatan dimaksud sebesar Rp. 13.055.091.401,00 (termasuk gaji dan tunjangan) dan teralisasi sebesar Rp. 7.210.792.506,39 atau 55,23 % di triwulan III.

Tabel 3
Realisasi kinerja program/kegiatan/subkegiatan
tahun 2025 (triwulan III)

Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Kinerja Realisasi (s.d Triwulan III)	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rerata persentase capaian kinerja program	100%	37,62%	37,62%	
Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	2 jenis dokumen	66,67%	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	100,00%	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 orang/ bulan	67 orang/ bulan	126,41%	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	9 laporan	75,00%	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	1 paket	100,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	83 orang	100,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	100,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100,00%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	5 paket	50,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	3 paket	1 paket	33,33%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	1 paket	50,00%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	5 dokumen	4 dokumen	80,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	18 laporan	90,00%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah dokumen dukungan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Ket
		Target	Realisasi (s.d Triwulan III)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6
PBE pada SKPD	pelaksanaan system PBE pada SKPD				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	3 jasa	100,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	8 laporan	66,67%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	9 laporan	75,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	9 laporan	75,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	6 jenis	100,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	100,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	9 unit	69,23%	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	-	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	3 unit	50,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	8 unit	61,54%	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	2 unit	66,67%	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	6,00%	11,42%	190,32%	
	Realisasi total terhadap target investasi	80%	114,89%	143,61%	
	Rasio investasi manufaktur terhadap total investasi masuk daerah	65%	-	-	
	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,50%	-	-	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	2 draft	100,00%	
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-	-	-	
Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha dan Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft/ kajian	2 draft/ kajian	100,00%	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	-	
Pemutakhiran data potensi	Jumlah daerah yang telah	1 daerah	1 daerah	100,00%	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Ket
		Target	Realisasi (s.d Triwulan III)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6
investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	
Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	5,00%	30,43%	608,6%	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	2 jenis	100,00%	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian Izin	75%	93,85%	125,13%	
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%	100%	100,00%	
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan	5585 pelayanan	5352 pelayanan	95,83%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	6 dokumen	120,00%	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 pelaku usaha	9168 pelaku usaha	458,4%	
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	7 pelaku usaha	16 pelaku usaha	228,57%	
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	5 kegiatan usaha	1 kegiatan usaha	20,00%	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan Perusahaan dalam pelaporan LKPM	30%	116,14%	387,13%	
	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	90%	100%	111,11%	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	152 kali	65 kali	42,76%	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	20 kegiatan usaha	10 kegiatan usaha	50,00%	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Ket
		Target	Realisasi (s.d Triwulan III)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Usahanya	dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	360 pelaku usaha	245 pelaku usaha	68,05%	
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 kegiatan usaha	44 kegiatan usaha	146,67%	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	5	5	100,00%	
	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	2%	2%	100,00%	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	100,00%	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	

Dari tabel diatas, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian program pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dari 6 program yang ada, 4 program capaiannya diatas 100% dikarenakan beberapa hal antara lain :
 - Tingginya nilai investasi di Kabupaten Gresik yang disebabkan banyaknya investor yang masuk
 - Dengan adanya sistem online (OSS RBA) dan SICANTIK membuat perizinan semakin mudah. Pelaku usaha dapat memproses izinnya sendiri secara online. Sehingga izin yang diterbitkan melalui sistem OSS pun menjadi banyak
 - Tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaporkan realisasi investasinya semakin tinggi dari tahun ke tahun

2. Untuk program yang capaiannya dibawah 100%, yaitu Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator rerata persentase capaian program, dari target 100% sampai triwulan III baru terealisasi 37,62% dikarenakan pelaksanaan MPP 2 dihold dulu pelaksanaannya.
3. Untuk capaian kegiatan, dari 12 kegiatan terdapat 3 kegiatan yang capaiannya masih dibawah 100% antara lain :
 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota capaiannya sebesar 42,76%. Dari 152 kali koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang direncanakan baru terealisasi sebanyak 65 kali. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal tidak maksimal pelaksanaannya.
4. Untuk capaian subkegiatan yang lebih tinggi maupun lebih rendah alasannya sama dengan alasan program/kegiatan diatas. Untuk subkegiatan yang Pemeliharaan Mebel yang capaiannya 0% dikarenakan pemeliharaan mebel dilakukan jika ada kerusakan.

Tabel 4 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun(n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPMPTSP s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun (n-1) 2025 %	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	100%	100%	95%	100%	105,26	95%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	18 jenis dokumen	12 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	100	3 jenis dokumen	18 jenis dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	6 dokumen	75,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 jenis dokumen	3 jenis dokumen	-	-	-	-	3 jenis dokumen	100%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	8 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	6 laporan	75,00%

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	12 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	10 dokumen	83,33%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN DPM PTSP	72 bulan	24 bulan	-	-	-	-	24 bulan	100%
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	211 orang/ bulan	51 orang/ bulan	52 orang/ bulan	52 orang/ bulan	100	50 orang/ bulan	153 orang/ bulan	72,51%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	6 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	100%
					Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36 laporan	75,00%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	6 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	6 paket	100%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	6 paket	2 paket	-	-	-	-	2 paket	100%
					Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	332 orang	83 orang	83 orang	83 orang	100	83 orang	249 orang	75,00%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	37 sub kegiatan	19 sub kegiatan	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	100	6 sub kegiatan	31 sub kegiatan	853,78%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung	900 buah	300 buah	-	-	-	-	300 buah	100%

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

					Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 paket	75,00%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	108 item	108 item	-	-	-	-	108 item	100%
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 paket	10 paket	10 paket	10 paket	100	10 paket	30 paket	75,00%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	6 jenis	6 jenis	-	-	-	-	6 jenis	100%
					Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100	3 paket	9 paket	75,00%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan	24 jenis	24 jenis	-	-	-	-	24 jenis	100%
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	6 paket	75,00%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undangan	10 jenis	10 jenis	-	-	-	-	10 jenis	100%
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	15 dokumen	75,00%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	130 kali	130 kali	-	-	-	-	130 kali	100%
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	260 laporan	65 laporan	65 laporan	65 laporan	100	20 laporan	150 laporan	57,69%
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	33,34%

					pada SKPD									
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	18 jasa	9 jasa	3 jasa	3 jasa	100	3 jasa	15 jasa	83,33%
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	260 kali	260 kali	-	-	-	-	260 kali	100%
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36 laporan	75,00%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24 bulan	24 bulan	-	-	-	-	24 bulan	100%
						Umlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36 laporan	75,00%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	64 jenis	64 jenis	-	-	-	-	64 jenis	100%
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36 laporan	75,00%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	36 jenis	18 jenis	6 jenis	6 jenis	100	6 jenis	30 jenis	83,33%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	2 kendaraan	2 kendaraan	-	-	-	-	2 kendaraan	100%
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3 unit	75,00%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	26 kendaraan	26 kendaraan	-	-	-	-	26 kendaraan	100%

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	52 unit	13 unit	13 unit	13 unit	100	13 unit	39 unit	75,00%
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis pemeliharaan mebel	10 jenis	5 jenis	-	-	-	-	5 jenis	50,00%
					Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit	-	5 unit	-	-	5 unit	10 unit	50,00%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 jenis	18 jenis	6 jenis	6 jenis	100	-	24 jenis	200%
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100	6 unit	12 unit	50,00%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	26 jenis	39 jenis	13 jenis	13 jenis	100	-	52 jenis	200%
					Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	52 unit	13 unit	13 unit	13 unit	100	13 unit	39 unit	75,00%
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	5 jenis	5 jenis	-	-	-	-	5 jenis	50,00%
					Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5 jenis	10 jenis	3 jenis	3 jenis	100	-	5 jenis	50,00%
					Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12 unit	-	-	-	-	3 unit	3 unit	25,00%
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	163,98%		31,23%	55,76%	178,55%	23,43%		-

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	12 draft	6 draft	2 draft	2 draft	100	2 draft	10 draft	83,33%
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah draf Rancangan Peraturan Tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 draft	2 draft	-	-	-	-	2 draft	100%
				Jumlah peraturan daerah/ provinsi dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	75,00%
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 hasil evaluasi	2 hasil evaluasi	-	-	-	-	2 hasil evaluasi	100%
				Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daera	2 kegiatan usaha	9 kegiatan usaha	-	-	-	-	9 kegiatan usaha	450,00%
			Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	8 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100	1 dokumen	11 dokumen	137,5%
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	12 draft/kajian	6 draft/ kajian	1 draft/ kajian	1 draft/ kajian	100	2 draft/ kajian	8 draft/ kajian	66,67%
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kab. Gresik	2 draft	2 draft	-	-	-	-	2 draft	100%
				Jumlah peraturan daerah (Perda) Rencana Umum	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	50,00%

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

					Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota								
				Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 daerah	-	1 daerah	1 daerah	100	1 daerah	1 daerah	100%
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 dokumen	-	-	-	-	-		
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian tentang Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Gresik	2 kajian	2 kajian	-	-	-	-	2 kajian	100%
					Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten /kota	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	4 dokumen	100%
				Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	24.27 %		3,93%	15,00%	381,68%	3,93%	70,00%	288,42%
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal	12 jenis	6 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	8 jenis	66,67%
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah kajian mengenai strategi promosi penanaman modal	1 video, 1 kajian strategi	1 video, 1 kajian strategi	-	-	-		1 video, 1 kajian strategi	100%
					Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	2 dokumen	50,00%
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah promosi investasi	4 kali	-	-	-	-		4 kali	100%
					Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	16 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	1 dokumen	7 dokumen	43,75%
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Ijin	75%	117,55%	75%	93,89%	125,18%	75%	117,55%	156,73%
				Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Jumlah pelayanan	29.298 pelayanan	109.637 pelayanan	4715 pelayanan	42562 pelayanan	902,69	5083 pelayanan	157.282 pelayanan	536,83%

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

				Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin/rekomendasi/perse tujuan/ sertifikasi/ pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	2.865 izin	36.416 izin	-	-	-		36.416 izin 1.271,06%
					Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi	6060 pelaku usaha	62334 pelaku usaha	-	-	-	-	62334 pelaku usaha 1.028,61%
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah izin / rekomendasi yang terbit	5.050 izin	4.965 izin	-	-	-	-	3146 izin 62,29%
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan	148 kali	17 kali	-	-	-		17 kali 11,49%
					Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	25 orang	26 orang	-	-	-	-	26 orang 104,00%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	80 kali	12 kali	-	-	-		12 kali 15,00%
					Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah	40 kegiatan usaha	188 kegiatan usaha	40 kegiatan usaha	9 kegiatan usaha	22,5	5 kegiatan usaha	202 kegiatan usaha 505,00%

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	120 dokumen	-	-	-	-	-	40 dokumen	33,34%	
					Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3000 pelaku usaha	-	1000 pelaku usaha	39960 pelaku usaha	3996,00	2000 pelaku usaha	41.960 pelaku usaha	1398,66%	
					Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	75 pelaku usaha	-	25 pelaku usaha	205 pelaku usaha	820,00	7 pelaku usaha	25 pelaku usaha	33,34%	
					Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	75 kegiatan usaha	-	25 kegiatan usaha	10 kegiatan usaha	40,00	5 kegiatan usaha	25 kegiatan usaha	33,34%	
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	53,42%	30%	69,42%	231,40%	30%	53,42%	178,06%
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Derah Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	1.037 kali	635 kali	152 kali	91 kali	59,87	152 kali	456 kali	43,97%

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan penanaman modal	179 kali	105 kali	-	-	-	-	-	-
				Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	25 kegiatan usaha	23 kegiatan usaha	25 kegiatan usaha	52 kegiatan usaha	208,00	-	-	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal	22 kali	25 kali	-	-	-	-	-	-
				Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	450 pelaku usaha	470 pelaku usaha	450 pelaku usaha	478 pelaku usaha	106,22	-		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	228 kali	276 kali	-	-	-	-	-	-
				Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	125 kegiatan usaha	86 kegiatan usaha	125 kegiatan usaha	120 kegiatan usaha	96,00	-	-	-
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	75 kegiatan usaha	-	-	-	-	20 kegiatan usaha	25 kegiatan usaha	33,34%
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1350 pelaku usaha	-	-	-	-	360 pelaku usaha	450 pelaku usaha	33,34%
			Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku	375 kegiatan	-	-	-	-	30 kegiatan usaha	125 kegiatan usaha	33,34%

					Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	usaha								
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	5	5	5	5	100,00%	5	5	100,00%
					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	18 jenis	9 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	6 jenis	33,34%
					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemanfaat sistem informasi	7.800 pengunjung	93.405 pengunjung	-	-	-	-	-	-
						Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	2 dokumen	2 dokumen	33,34%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 5 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anal isis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025 (trivulan III)	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pertumbuhan realisasi investasi	-	-	41,99%	0,50 %	1,00 %	1,49 %	22,66 %				-
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk layanan perizinan penanaman modal	-	-	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	-
3	Realisasi investasi	-	-		20,00 T	20,20 T	20,50 T	37,9 T		20,20 T	20,50 T	
4	Realisasi investasi sektor manufaktur	-	-		13,00 T	13,13 T	13,59 T	32,5 T		13,13 T	13,59 T	
5	Pertumbuhan investasi sektor manufaktur	-	-		0,50 %	1,00 %	1,52 %	-28,52%		1,00 %	1,52 %	
6	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	-	-		50,33%	51,28%	51,29%	51,25%		51,28%	51,29%	
7	Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (rasio)	-	-		25/800	35/800	40/800	0		35/800	40/800	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah mewujudkan Kabupaten Gresik sebagai tujuan utama investasi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan kebijakan penanaman modal yang diarahkan melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur dan perbaikan sistem informasi.

Penilaian capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2023 dapat dilihat dari peningkatan realisasi investasi yang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 131,48% dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2022 pertumbuhan realisasi investasi sebesar 24,11%. Pertumbuhan investasi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik sehingga Kabupaten Gresik menjadi daerah tujuan penanaman modal. Realisasi investasi di Kabupaten Gresik tahun 2021-2024 seperti tampak pada tabel data berikut:

Tabel 6
Realisasi Investasi Kabupaten Gresik
Tahun 2021 – 2025 (triwulan III)

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025 (triwulan II)
1	PMA (trilyun rupiah)	8,49	24,84	39,78	26,21	11,44
2	PMDN (trilyun rupiah)	8,27	6,75	9,68	11,70	11,54
	Total (trilyun rupiah)	16,76	31,59	49,46	37,91	22,98

Tabel 7
Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik
Tahun 2021 – 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	2,98 %	11,05%	370,81%
2022	2,89%	24,11%	834,26 %
2023	5,00%	31,70%	634,00%
2024	41,99 %	22,66%	53,97%

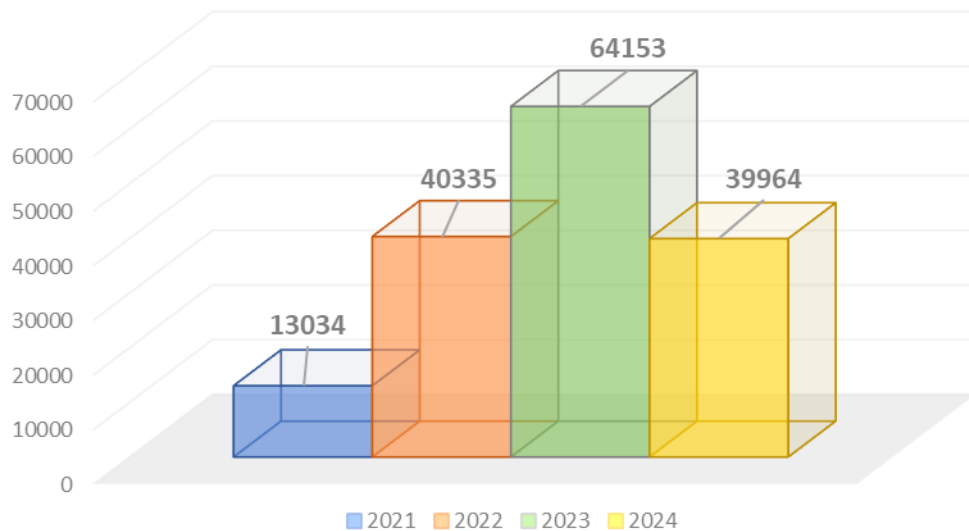
Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi investasi mengalami tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021 hingga 2023. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan lonjakan besar, mulai dari 8,49 triliun rupiah tahun 2021 naik menjadi 39,78 triliun rupiah pada tahun 2023. Sementara itu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami fluktuasi, dengan angka terendah di tahun 2022 sebesar 6,75 triliun rupiah dan kemudian meningkat Kembali mencapai 11,70 triliun rupiah pada tahun 2024. Pada tahun berikutnya, total investasi mengalami penurunan menjadi 37,91 triliun rupiah, meskipun masih berada diatas nilai investasi tahun-tahun sebelumnya sebelum 2023

Peningkatan investasi yang signifikan pada tahun 2023 ini disebabkan oleh adanya proyek strategis yang besar, yaitu proyek smelter Freeport. Proyek ini berhasil menarik investasi asing dalam jumlah besar, sehingga menjadi factor dominan yang mendorong peningkatan realisasi investasi pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, capaian investasi tetap cukup tinggi jika dibandingkan tahun-tahun awal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melaksanakan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi Pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ikut melaksanakan program-program Pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik bertugas melayani Masyarakat sesuai prinsip-prinsip good governance melalui pelayanan yang prima.

Sebagai fungsi pelayanan, mulai tahun 2021 sampai 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik telah menerbitkan 157.486 izin sebagaimana grafik dibawah ini :

Gambar 1
Grafik Penerbitan Izin Tahun 2021-2024
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik



Tren penerbitan izin tahun 2021-2024 memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023, seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas investasi dan semakin baiknya sistem pelayanan perizinan yang diterapkan. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan jumlah izin yang diterbitkan, capaian tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022, sehingga secara keseluruhan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sangat progresif.

Implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*) sejak tahun 2021 yang secara bertahap mendorong percepatan layanan perizinan berbasis risiko. Hal ini membuat jumlah izin yang diterbitkan meningkat signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan jumlah izin pada tahun 2024 lebih disebabkan oleh faktor normalisasi aktivitas pasca lonjakan pada

tahun 2023, adanya penyederhanaan jenis perizinan serta penyesuaian regulasi nasional yang membuat beberapa izin tidak lagi wajib diterbitkan oleh daerah

Tabel 8
Penerbitan Izin Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Jenis Izin	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
I	NON OSS													
A	Blok Plan	2	4	1	7	2	5	7	4	3	5	4	7	51
B	PBG	4	11	67	37	67	67	71	167	130	98	114	8	841
C	IMB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	SLF	2	77	16	19	129	73	147	41	69	24	21	2	620
E	Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Non Berusaha (PKKPR)	102	119	50	14	80	18	53	79	110	89	59	81	854
F	Data SKKLH Non Pemerintah	0	0	0	3	0	0	1	0	2	0	0	0	6
G	Data PKPLH Khusus Pemerintah	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5
H	Data PKPLH Khusus Non Pemerintah	0	2	3	11	2	0	2	1	0	2	0	2	25
I	Surat Izin Menempati Stand/Kios Pasar (SIM Pasar)	33	0	17	0	2	9	9	35	0	0	23	30	158
J	Izin Pendirian SMP	2	1	0	0	0	1	1	1	2	0	3	2	13
K	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
L	Izin Pendirian Satuan PAUD	2	5	5	3	5	1	0	3	8	1	4	6	43
M	Data Satuan Pendidikan Nonformal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	3	2	12
N	Izin Reklame Insidentil	1	1	7	8	14	13	3	3	1	9	15	31	106
O	Reklame Tetap	67	9	27	52	3	12	72	15	6	45	2	44	354
P	Reklame Permanen	20	7	6	9	16	8	14	24	4	21	2	12	143
II	OSS													

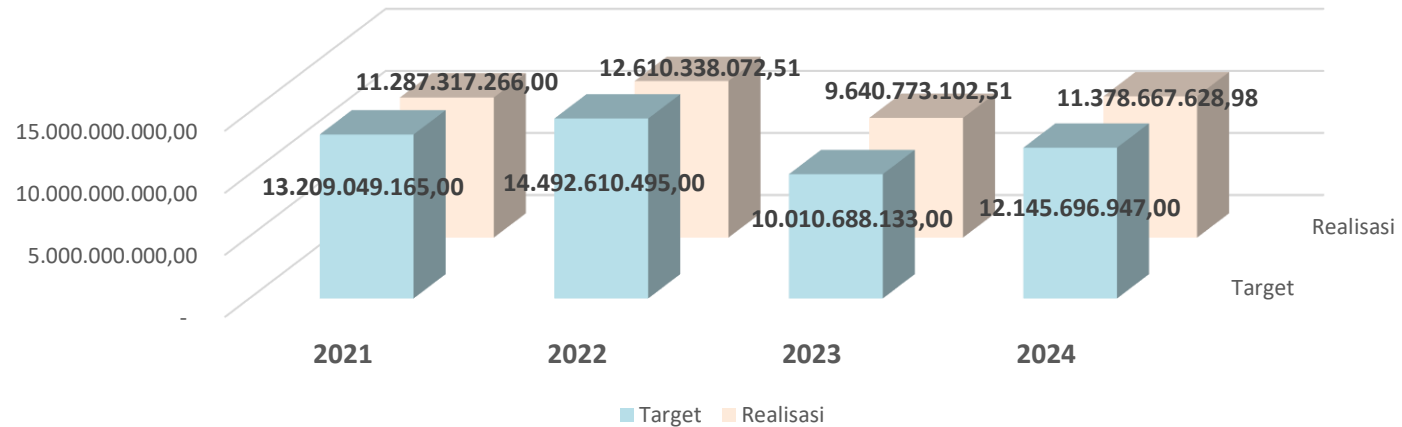
*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

No	Jenis Izin	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
A	NIB	1055	893	1113	4811	1438	1187	1449	1103	1066	1110	4422	1624	21271
B	Izin	1	0	2	1	3	0	0	2	1	2	2	3	17
C	Persyarat Dasar	1184	1041	1346	817	1681	33	1713	1306	1271	1335	659	390	12776
D	Umku	61	69	98	27	62	0	0	0	3	1	3	3	327
E	Sertifikat Standar	211	217	233	148	236	2	259	252	196	222	188	177	2341
	Jumlah	2750	2456	2991	5967	3744	1429	3801	3036	2872	2970	5524	2424	39964

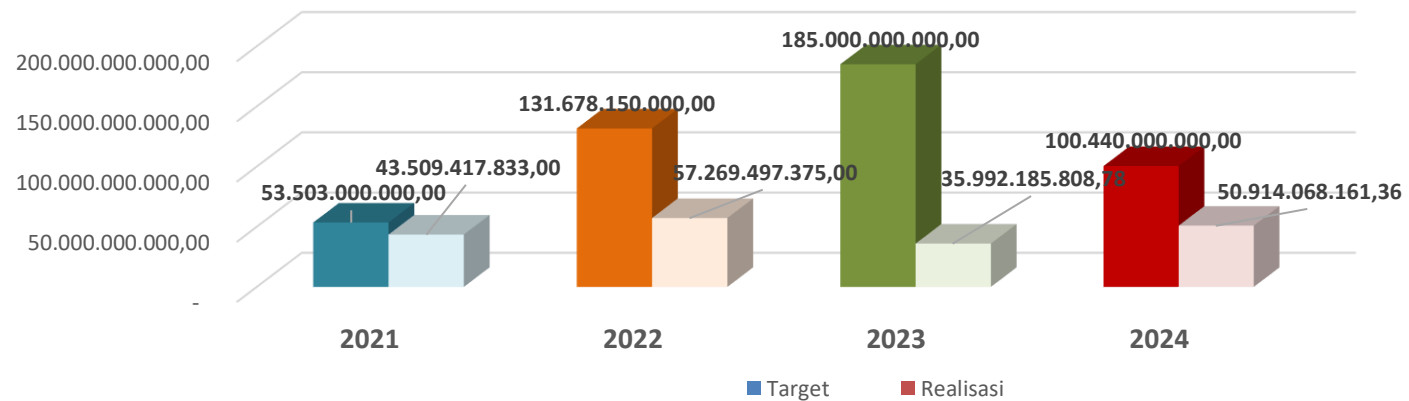
Dengan jumlah berkas yang tidak sedikit, pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk professional dalam melakukan pelayanan dengan mengacu pada sistem pelayanan yang distandarkan. Ditambah lagi dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bertambahnya jenis izin yang harus dilayani tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memenuhi kualitas secara akademis namun harus telah siap bekerja melayani masyarakat.

Telah disebutkan di awal bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melaksanakan dua fungsi. Capaian kinerja dengan fungsi pelayanan telah diuraikan di atas. Sedangkan fungsi pembangunan yang terkait dengan kegiatan operasional dengan alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disajikan dalam dua grafik yaitu grafik target dan realisasi belanja dan grafik target dan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) selama kurun waktu 2021-2024 sebagai berikut:

Gambar 2
Target dan Realisasi APBD Tahun 2021-2024
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik



Gambar 3
Target dan Realisasi PAD Tahun 2021-2024
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik



Dari grafik APBD tahun 2021-2024 dapat dilihat bahwa anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik diangka 10 milyar sampai 14 milyar. Di tahun 2023 terjadi defisit pada Pemerintah Kabupaten Gresik yang menyebabkan belanja kegiatan selain gaji, Listrik dan BBM harus distop pelaksanaannya di pertengahan tahun.

Berbeda dari target belanja yang berada diangka stabil, target retribusi mengalami kenaikan walaupun dengan adanya PBG dari IMB yang seharusnya membuat penerimaan retribusi menurun sebesar 40% - 60%, tetapi target retribusi dibuat naik. Namun demikian realisasi retribusi stabil diangka 50 milyar kecuali di tahun 2023 dikarenakan beberapa hal diantaranya :

1. Permohonan bangunan sederhana menemui kesulitan apabila diwajibkan dalam sistem penggunaan konsultan bersertifikat karena tidak ada standarisasi harga terhadap konsultan yang dimaksud
2. Banyaknya permasalahan terkait permohon izin bangunan seperti Revisi gambar, kekurangan berkas Amdal, Andalalin, Peil Banjir, dll
3. Sistem SIMBG yang masih belum optimal

2.3.2 Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal,kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sedangkan isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Beberapa identifikasi permasalahan-permasalahan di bidang penanaman modal dan perizinan diantaranya sebagai berikut :

Tabel. 9
Permasalahan Pembangunan berdasarkan Identifikasi
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Aspek	Permasalahan
1	Kelembagaan dan Regulasi	- Terjadinya transformasi kelembagaan pasca terbitnya UU Cipta Kerja, PP Nomor 6 Tahun 2021 dan Pemendagri Nomor 25 Tahun 2021 yang mengharuskan Dinas Penanaman Modal dan PTSP beroperasi secara mandiri. - Perubahan struktur dari jabatan struktural ke fungsional membutuhkan adaptasi organisasi dan sumber daya manusia
2	Sumber daya manusia	Perlunya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama di bidang pelayanan untuk meningkatkan kualitas, kecepatan dan kurasi pelayanan perizinan dan penanaman modal serta memastikan bahwa seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya dalam menghadapi transformasi digital dan kelembagaan
3	Ekonomi dan investasi	- Minimnya kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM lokal - Belum optimalnya promosi dan pemetaan investasi daerah. Banyak potensi investasi yang belum terdigitalisasi atau belum dipromosikan secara aktif melalui media dan forum investor
4	Pelayanan Publik	- Implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) masih belum berjalan secara optimal, khususnya masih adanya kendala teknis dalam pengoperasian sistem, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha dan aparatur serta belum maksimalnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam mendukung kelengkapan data dan sinkronisasi proses perizinan

2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana, dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif maka dengan bertitik tolak dari fakta sejarah serta kondisi faktual maka berdasarkan masa bhakti 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Gresik mencetuskan visi untuk merangkul semangat seluruh stakeholder dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah serta mengedepankan nilai-nilai luhur demi kesejahteraan masyarakat Gresik sebesar-besarnya yaitu;

“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok visi pembangunan sebagai berikut:

No	Uraian Filosofis
1	Pembangunan Gresik Maju mencerminkan komitmen Kabupaten Gresik untuk menjadi daerah yang berkembang secara dinamis, inovatif, dan berdaya saing dalam berbagai sektor. Kemajuan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang modern, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Dengan potensi yang dimiliki, Gresik diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

	Secara historis, Gresik telah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran peradaban Islam di Nusantara sejak abad ke - 14. Keunggulan geografis dan potensi maritim menjadikan Gresik sebagai daerah yang memiliki fondasi kuat dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Sejarah panjang sebagai kota perdagangan dan industri memberikan modal besar bagi Gresik untuk terus maju dengan tetap mempertahankan nilai - nilai budaya dan kearifan lokal. Dalam perspektif pembangunan, kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh inovasi dan daya saing. Kabupaten Gresik perlu mengembangkan ekosistem yang mendukung investasi, industri berbasis teknologi, serta ekonomi kreatif yang mampu membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif di era globalisasi. Kemajuan yang ingin dicapai juga harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. Artinya, seluruh lapisan masyarakat harus merasakan manfaat pembangunan, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil. Di sisi lain, keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Pengelolaan sumber daya alam yang bijak, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta perencanaan tata ruang yang berorientasi pada kelestarian lingkungan akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan Gresik yang maju.
2 Berkelanjutan	Berkelanjutan dalam visi pembangunan Kabupaten Gresik menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan

ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Konsep ini berakar pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam konteks Kabupaten Gresik, keberlanjutan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi yang inklusif, hingga tata kelola pemerintahan yang berpihak pada keseimbangan jangka panjang.

Secara ekonomi, pembangunan berkelanjutan berarti mendorong pertumbuhan yang stabil dan inklusif dengan memperhatikan keberlanjutan sektor industri, pertanian, dan kelautan. Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat industri di Jawa Timur harus memastikan bahwa pertumbuhan industrinya tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi, pengelolaan limbah industri yang bertanggung jawab, serta pengembangan ekonomi hijau menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dari sisi sosial, keberlanjutan menciptakan pembangunan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat. Pembangunan tidak hanya harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan tetapi juga memperhatikan masyarakat di daerah perdesaan dan pesisir. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang merata menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa

		manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan UMKM juga menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, keberlanjutan juga harus tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip <i>good governance</i>, di mana kebijakan pembangunan dirancang berdasarkan data yang akurat, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berjalan dalam jangka pendek tetapi juga memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan untuk masa depan Kabupaten Gresik
3	Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Konsep Pusat Pertumbuhan Ekonomi dalam visi pembangunan Kabupaten Gresik menegaskan peran strategis daerah ini sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat regional maupun nasional. Sebagai salah satu kabupaten industri utama di Jawa Timur, Gresik memiliki potensi besar dalam sektor manufaktur, maritim, pertanian, serta perdagangan dan jasa. Dengan posisi geografis yang strategis, infrastruktur yang berkembang, serta keunggulan sumber daya, Gresik diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Kabupaten Gresik telah lama dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Jawa Timur. Keberadaan berbagai industri skala besar, seperti semen, petrokimia, makanan dan minuman, serta industri berbasis logam dan energi, menjadikan Gresik sebagai motor pertumbuhan ekonomi di

Kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Dengan semakin berkembangnya kawasan industri, Gresik memiliki peluang untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk memperkuat posisinya sebagai pusat industri, diperlukan kebijakan yang mendukung hilirisasi industri, inovasi teknologi, dan efisiensi rantai pasok. Pemerintah daerah juga perlu mendorong industri yang berorientasi ekspor serta memberikan insentif bagi industri berbasis energi hijau dan ekonomi sirkular agar pertumbuhan industri tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagai daerah pesisir yang memiliki akses langsung ke Selat Madura dan Laut Jawa, Gresik memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi maritim.

Pelabuhan Gresik dan Pelabuhan Internasional Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE) menjadi aset penting dalam meningkatkan daya saing perdagangan dan logistik. Penguatan infrastruktur pelabuhan serta pengembangan industri berbasis kelautan, seperti perikanan, galangan kapal, dan ekspor hasil laut, menjadi kunci dalam memperkuat peran Gresik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim. Selain itu, sektor perdagangan juga terus berkembang, terutama dengan semakin luasnya jaringan distribusi barang dan jasa. Peningkatan konektivitas antara pelabuhan, kawasan industri, dan pusat perdagangan akan semakin mempercepat perputaran ekonomi di Gresik.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Gresik membutuhkan infrastruktur yang

	kuat dan berkualitas. Pembangunan jalan, pelabuhan, kawasan industri, serta jaringan transportasi yang terintegrasi akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, digitalisasi dan peningkatan akses internet di seluruh wilayah juga menjadi faktor penting dalam mendukung ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. Investasi dalam infrastruktur hijau dan pembangunan yang ramah lingkungan juga perlu diprioritaskan agar pertumbuhan ekonomi tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Dengan perencanaan yang matang, Gresik dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang maju, efisien, dan berkelanjutan.
4 Kesejahteraan Masyarakat	Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap proses pembangunan. Dalam visi pembangunan Kabupaten Gresik 2025 - 2029, kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai peningkatan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan. Konsep ini mengacu pada prinsip keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, akses terhadap layanan dasar, serta peluang untuk berkembang secara ekonomi dan sosial. Dimensi kesejahteraan ekonomi mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja yang luas, serta keberlanjutan usaha bagi berbagai lapisan sosial. Kabupaten Gresik, dengan sektor industri, maritim, dan pertaniannya, memiliki peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat harus

memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar yang memadai, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, serta infrastruktur sosial lainnya. Gresik sebagai daerah industri harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama kelompok rentan berbasis pendekatan *Gender, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya bersifat ekonomi dan sosial, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kabupaten Gresik perlu membangun system perlindungan sosial yang tangguh agar Masyarakat tetap dapat bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau pandemi.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan yaitu :

Misi ke-1

Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berakhlakul Karimah;

Misi ke-2

Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Misi ke-3

Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;

Misi ke-4

Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.

Misi ke-5

Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik masuk pada **Misi ke-2** Kabupaten Gresik yaitu ***‘Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Tujuan ke-2 yaitu ‘Terwujudnya Transformasi Ekonomi Gresik didukung Optimalisasi Potensi Daerah yang Berdaya Saing ‘ dan indikator kinerjanya yaitu :
Pertumbuhan Ekonomi***

Sedangkan sasaran Kabupaten Gresik yang menaungi Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu sasaran ke- 6 yaitu : ***‘Meningkatkan Daya Saing Sektor Manufaktur Berteknologi Maju’*** dengan indikator kinerja yaitu **Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur**.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pengembangan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tentunya tidak lepas dari dinamika lingkungan internal dan eksternal. Dinamika lingkungan internal akan dikelola secara efektif dengan mengatasi secara bertahap berbagai kekurangan dan kelemahan melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya. Akan tetapi dinamika eksternal yang berupa tantangan dan peluang merupakan faktor-faktor penting yang berada di luar kendali instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. Meskipun demikian, faktor eksternal tersebut harus terus dapat diidentifikasi karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja OPD.

Secara umum, tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ke depan dalam usaha meningkatkan penanaman modal adalah sebagai berikut:

Tantangan :

1. Implementasi Digitalisasi dan Otomasi Perizinan
2. Penyesuaian Tata Kelola Jabatan Fungsional
3. Ketidakpastian Regulasi dan Kebijakan Nasional
4. Kompetisi Investasi Regional dan Global
5. Terbitnya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang merinci struktur kelembagaan dan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan PTSP termasuk perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dalam pengelolaan penanaman modal dan penataan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP nantinya akan berdiri sendiri, tidak ada campur tangan kepala daerah dalam tanda tangan untuk pengeluaran izin, semua akan berbasis elektronik. Sehingga dapat memutus rantai birokrasi yang panjang. Hal ini selain dapat mendorong percepatan penanaman modal di Kabupaten Gresik juga merupakan tantangan bagi daerah untuk dapat mempersiapkan baik dari segi sarana prasarana maupun SDM dalam mendukung terlaksananya peraturan pemerintah tersebut.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mencabut aturan lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Salah satu perubahan pengaturan dalam PP ini yaitu perizinan usaha menjadi berbasis risiko. Dalam perjalanannya OSS mengalami transisi, dimulai OSS versi 1.0 pada tahun 2018, OSS versi 1.1 pada tahun 2019 (surat Edaran BKPM Nomor :

5743/A.8/B.1/2019 tahun 2019 tentang Rencana Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) versi 1.1) dan OSS RBA yang secara resmi diluncurkan pada 9 Agustus 2021. Walaupun telah beberapa kali mengalami transisi, penggunaan OSS masih belum maksimal karena terkendala sistem dari pusat. Selain itu OSS RBA juga belum terkoneksi dengan sistem yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lain. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang baik bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP maupun bagi para investor/pemohon izin dalam memanfaatkan hadirnya OSS ini.

Tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP diantaranya untuk dapat melaksanakan amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 ini secara maksimal mungkin sehingga OSS ini dapat berjalan dan dapat dipahami oleh investor/pemohon yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik.

Peluang bagi investor/pemohon izin dengan terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 ini adalah kemudahan dalam memperoleh izin. Karena dengan mengakses OSS ini investor/pemohon izin sudah mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berfungsi sebagai TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan Akses Kepabeanan.

7. Lokasi Kabupaten Gresik yang sebagai *hinterland* Kota Surabaya yang merupakan pusat perdagangan barang dan jasa terbesar di kawasan Indonesia Timur dan sekaligus pintu yang menghubungkan dunia luar baik regional maupun internasional dengan dukungan pelabuhan dan bandara internasional. Hal ini dapat membuat para investor semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik.
8. Dijadikannya JIPE (*Java Integrated Industrial and Port Estate*) sebagai KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) melalui PP Nomor 71 Tahun 2021. Hal ini dapat mendorong para investor untuk

menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik, karena adanya KEK dapat memberikan fasilitas akses ke pasar global, baik melalui pelabuhan maupun bandara.

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Perumusan program kegiatan diprioritaskan untuk mendukung program Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan yang merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2025-2029. Untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengemban Nawa Karsa **Gresik Tuntas (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)** dengan Sub Navigasi '**Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan**'.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdapat 8 program dan 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 12.328.876.599,-

Berikut disajikan review terhadap rancangan RKPD tahun 2025 untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tabel **Tabel T-C.31** sebagai berikut :

Tabel 10 (Tabel T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				14.382.552.970,29	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				14.382.552.970,29	
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				14.382.552.970,29	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				14.382.552.970,29	
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Rerata persentase capaian kinerja program	100%	12.947.455.713,29	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Rerata persentase capaian kinerja program	100%	12.947.455.713,29	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	45.360.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	45.360.000	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penana man Modal dan PTSP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	31.219.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penana man Modal dan PTSP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	31.219.800	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penana man Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	14.140.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penana man Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	14.140.400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	9.959.530.655,29	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	9.959.530.655,29	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penana man Modal dan PTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 orang/ bulan	9.945.886.255,29	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penana man Modal dan PTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 orang/ bulan	9.945.886.255,29	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Dinas Penana man Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	13.644.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Dinas Penana man Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	13.644.400	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	204.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	204.400.000	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	204.400.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	204.400.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	742.052.192	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	742.052.192	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	36.174.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	36.174.200	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	170.288.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	170.288.000	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	3 paket	52.920.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	3 paket	52.920.000	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	42.546.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	42.546.900	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	6.723.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	6.723.600	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 laporan	318.109.192	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 laporan	318.109.192	
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system PBE pada SKPD	1 dokumen	115.290.300	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system PBE pada SKPD	1 dokumen	115.290.300	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	1.667.329.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	1.667.329.600	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.958.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.958.200	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	448.034.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	448.034.400	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.217.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.217.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	328.783.266	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	328.783.266	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	38.556.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	38.556.700	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	61.292.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	61.292.000	
18	Pemeliharaan Mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	2.380.800	Pemeliharaan Mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	2.380.800	
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	40.858.900	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	40.858.900	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	1.755.573.566	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	1.755.573.566	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	10.121.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	10.121.300	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	6,00%	564.759.343	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	6,00%	564.759.343	
			Realisasi total terhadap target investasi	80%				Realisasi total terhadap target investasi	80%		
			Rasio investasi manufaktur terhadap total investasi masuk daerah	65%				Rasio investasi manufaktur terhadap total investasi masuk daerah	65%		
			Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,50%				Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,50%		
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	144.696.543	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	144.696.543	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	5.581.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	5.581.000	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 dokumen	45.286.009	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 dokumen	45.286.009	
	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha dan Berbasis Resiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 dokumen	93.829.534	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha dan Berbasis Resiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 dokumen	93.829.534	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft/ kajian	420.062.800	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft/ kajian	420.062.800	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	125.810.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	125.810.000	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 daerah	16.848.200	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 daerah	16.848.200	
28	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	2 dokumen	277.404.600	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 dokumen	277.404.600	
	Program Promosi Penanaman Modal		Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	5,00%	356.702.800	Program Promosi Penanaman Modal		Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	5,00%	356.702.800	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	356.702.800	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	356.702.800	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	325.087.600	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	325.087.600	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	31.615.200	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	31.615.200	
	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase penyelesaian Izin	75%	297.065.814	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase penyelesaian Izin	75%	297.065.814	
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%		
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelayanan	5585 pelayanan	297.065.814	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelayanan	5585 pelayanan	297.065.814	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 dokumen	38.543.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 dokumen	38.543.200	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 pelaku usaha	66.708.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 pelaku usaha	66.708.000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 pelaku usaha	186.822.614	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 pelaku usaha	186.822.614	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	10 kegiatan usaha	4.992.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	10 kegiatan usaha	4.992.000	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase kepatuhan Perusahaan dalam pelaporan LKPM	30%	213.401.600	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase kepatuhan Perusahaan dalam pelaporan LKPM	30%	213.401.600	
			Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	90%				Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	90%		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	100 kali	213.401.600	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	100 kali	213.401.600	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 kegiatan usaha	31.490.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 kegiatan usaha	31.490.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	320 pelaku usaha	128.767.600	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	320 pelaku usaha	128.767.600	
	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	125 kegiatan usaha	53.144.000	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	125 kegiatan usaha	53.144.000	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	5	3.104.500	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	5	3.104.500	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	2%				Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	2%		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis dokumen	3.104.500	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis dokumen	3.104.500	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 dokumen	3.104.500	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 dokumen	3.104.500	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel **T-C.32** sebagai berikut:

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Table 11 (Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				-
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				-
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Rerata persentase capaian kinerja program	100%	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	-
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 orang/ bulan	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	-
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	-
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	3 paket	-
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	-
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	5 dokumen	-
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 laporan	-
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system PBE pada SKPD	1 dokumen	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	-
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	-
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	-
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	-
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	-
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	-
18	Pemeliharaan Mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	-
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	-
21	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	-
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			Persentase Peningkatan Jumlah Investor	6,00%	-
			Realisasi total terhadap target investasi	80%	-
			Rasio investasi manufaktur terhadap total investasi masuk daerah	65%	-
			Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,50%	-
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	-
22	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	-
23	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 dokumen	-
24	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha dan Berbasis Resiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 dokumen	-
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota			Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft/ kajian	-
25	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	-
26	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 daerah	-
27	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 dokumen	-
Program Promosi Penanaman Modal			Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	5,00%	-
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	-

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	-
29	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	-
Program Pelayanan Penanaman Modal			Persentase penyelesaian Izin	75%	-
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%	-
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah pelayanan	5585 pelayanan	-
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 dokumen	-
31	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 pelaku usaha	-
32	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 pelaku usaha	-
33	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	10 kegiatan usaha	-
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			Persentase kepatuhan Perusahaan dalam pelaporan LKPM	30%	-
			Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	90%	-
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	100 kali	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 kegiatan usaha	
35	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	320 pelaku usaha	
36	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	125 kegiatan usaha	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	5	
			Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	2%	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis dokumen	
37	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tabel 12

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1	Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.	Kewenangan pemrosesan izin sebagian masih berada pada instansi – instansi teknis
2	Kewenangan penerbitan izin investasi diatas >10 milyar	1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008	Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
3	Pelaksanaan OSS (One Single submission)	1. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan	Penerapan OSS belum resmi diterapkan di daerah

No	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
		Berusaha 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	namun SPIPSE sebagai sistem pelayanan perizinan investasi sebagai sistem yang diterapkan sebelumnya, telah dihentikan
4	Regulasi dan kebijakan yang <i>out of date</i>	1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2015-2019 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Perka BKPM Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Kabupaten/Kota	Regulasi yang menjadi acuan dalam dokumen-dokumen sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan didaerah perlu untuk d disesuaikan dengan kondisi saat ini

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Merujuk pada Permendagri No.86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran ini harus memberikan kontribusi untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik telah menetapkan visi pembangunan yang sekaligus menjadi visi pemerintah kabupaten pada periode 2021-2026 yaitu **“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan periode 2025-2026, yaitu:

- (1) Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berakhlakul Karimah

- (2) Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- (3) Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
- (4) Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat
- (5) Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) yang ikut bertanggung jawab dalam mendukung misi kedua Kepala Daerah Kabupaten Gresik yaitu **“Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing”** dengan tujuan :

Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi daerah yang berdaya saing (*advanced indigenous economy*) dengan indikator tujuan : *Pertumbuhan ekonomi*

Sedangkan sasaran RPJMD dan menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik yaitu **“Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju”** dengan indikator : *Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur*

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 yang merupakan sasaran RPJMD yang akan dicapai adalah sebagai berikut : **“Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju”**

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas maka ditetapkan dua sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis

2. Meningkatnya kemudahan layanan investasi

Dari masing-masing sasaran tersebut diatas maka ditentukan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Realisasi investasi
2. Realisasi investasi sektor manufaktur
3. Pertumbuhan realisasi investasi
4. Pertumbuhan investasi sektor manufaktur
5. Rasio PDRB industri pengolahan (%)
6. Rasio kemitraan usaha besar dengan UMKM (rasio)
7. Nilai survey kepuasan masyarakat untuk layanan perizinan dan penanaman modal

Untuk memperoleh gambaran hubungan antara keduanya, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dapat dilihat di Tabel 4.1

Tabel 13
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kinerja Tujuan/Sasaran					
			Target Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Meningkatkan investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis	Realisasi investasi	20,00 T	20,20 T	20,50 T	20,90 T	21,40 T	22,00 T
		Realisasi investasi sektor manufaktur	13,00 T	13,13 T	13,33 T	13,59 T	13,91 T	14,3 T
		Pertumbuhan realisasi investasi	0,50 %	1,00 %	1,49 %	1,95%	2,39%	2,80 %

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kinerja Tujuan/Sasaran					
			Target Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Pertumbuhan investasi sektor manufaktur	0,50 %	1,00 %	1,49 %	1,95%	2,39%	2,80 %
		Rasio PDRB industri pengolahan (%)	50,33%	51,28 %	51,29%	51,30%	51,32%	51,33%
		Rasio kemitraan usaha besar dengan UMKM (rasio)	25/800	35/800	40/800	45/800	50/800	55/800
	Meningkatnya kemudahan layanan investasi	Nilai survey kepuasan masyarakat untuk layanan perizinan dan penanaman modal	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, selanjutnya adalah dirumuskan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan kebijakan ini merupakan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

3.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2026 telah mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu :

Visi : Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Misi ke 2 : Percepatan Pembangunan perekonomian daerah yang merata, berbasis potensi keunggulan local yang berkualitas dan berdaya saing

2. Sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu :

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- Kewenangan penerbitan izin investasi

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tahun 2026 terdapat 6 program dan 12 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 14.382.552.970,29,-

Berikut ini tabel rekapitulasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 serta ringkasan prioritas permasalahan penanaman modal dan perizinan tahun 2026 dan program/kegiatan utama untuk menyelesaikannya.

Table 14 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				14.382.552.970,29				15.752.504.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				14.382.552.970,29				15.752.504.000,00
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rerata persentase capaian kinerja program		100%	12.947.455.713,29			100%	14.168.447.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan		3 jenis dokumen	45.360.00,00			3 jenis dokumen	80.000.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	31.219.800,00	APBD	-	1 dokumen	50.000.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 laporan	14.140.400,00	APBD	-	2 laporan	30.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan		2 dokumen	9.959.530.655,29			2 dokumen	10.030.000.000,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	53 orang/ bulan	9.945.886.255,29	APBD	-	52 orang/ bulan	10.000.000.000,00

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 laporan	13.644.400,00	APBD	-	12 laporan	30.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah		1 paket	204.400.000,00			1 paket	100.000.000,00
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	83 orang	204.400.000,00	APBD	-	83 orang	100.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah		6 sub kegiatan	742.052.192,00			6 sub kegiatan	506.140.350,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 paket	36.174.200,00	APBD	-	1 paket	70.448.300,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10 paket	170.288.000,00	APBD	-	10 paket	150.000.000,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3 paket	52.920.000,00	APBD	-	3 paket	52.920.000,00
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 paket	42.546.900,00	APBD	-	2 paket	42.546.900,00
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5 dokumen	6.723.600,00	APBD	-	5 dokumen	6.723.600,00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	Dinas Penanaman	65 laporan	318.109.192,00	APBD	-	65 laporan	100.211.103,00

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	SKPD	koordinasi dan konsultasi SKPD	Modal dan PTSP						
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	115.290.300,00	APBD		1 dokumen	83.290.447,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah		3 jasa	1.667.329.600,00			3 jasa	2.251.435.800,00
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 laporan	1.958.200,00	APBD	-	12 laporan	7.758.200,00
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 laporan	448.034.400,00	APBD	-	12 laporan	943.677.600,00
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12 laporan	1.217.400.000,00	APBD	-	12 laporan	1.300.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah		6 jenis	328.783.266,00			6 jenis	1.200.870.850,00
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 unit	38.556.700,00	APBD	-	1 unit	42.370.000,00
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	13 unit	61.292.000,00	APBD	-	13 unit	63.210.350,00
18	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5 unit	2.380.800,00	APBD	-	5 unit	5.555.200,00

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6 unit	40.858.900,00	APBD	-	6 unit	57.597.000,00
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	13 unit	175.573.566,00	APBD	-	13 unit	1.008.146.700,00
21	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3 unit	10.121.300,00	APBD	-	3 unit	23.991.600,00
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor		6,00%	564.759.343,00			7,00%	227.372.000,00
		Realisasi total terhadap target investasi		80%				80%	
		Rasio investasi manufaktur terhadap total investasi masuk daerah		65%				65%	
		Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan		4,50%				4,60%	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas		2 draft	144.696.543,00			2 draft	107.694.400,00
22	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	5.581.000,00	APBD	-	1 dokumen	55.000.000,00
23	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	45.286.009,00	APBD	-	1 dokumen	26.549.079,00

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha dan Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 dokumen	93.829.534,00	APBD	-	1 dokumen	26.145.321,00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas		2 draft/ kajian	420.062.800,00			2 draft/ kajian	119.677.600,00
25	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	125.810.000,00	APBD	-	1 dokumen	50.000.000,00
26	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 daerah	16.848.200,00	APBD	-	1 daerah	19.677.600,00
27	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	277.404.600,00	APBD		1 dokumen	50.000.000,00
	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal		5,00%	356.702.800,00			5,00%	401.353.000,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 jenis	356.702.800,00			2 jenis	401.353.000,00
28	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	325.087.600,00	APBD	-	4 dokumen	350.000.000,00
29	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	31.615.200,00	APBD	-	1 dokumen	51.353.000,00
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian Izin		75%	297.065.814,00			75%	799.148.000,00
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin		100%				100%	

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		sesuai ketentuan							
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan		5585 pelayanan	297.065.814,00		-	6185 pelayanan	799.148.000,00
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10 dokumen	38.543.200,00	APBD	-	40 dokumen	109.828.755,00
31	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2000 pelaku usaha	66.708.000,00	APBD	-	1000 pelaku usaha	300.000.000,00
32	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10 pelaku usaha	186.822.614,00	APBD	-	25 pelaku usaha	339.319.245,00
33	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10 kegiatan usaha	4.992.000,00	APBD		25 kegiatan usaha	50.000.000,00
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	Persentase kepatuhan Perusahaan dalam		30%	213.401.600,00			30%	141.783.000,00

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Modal	pelaporan LKPM							
		Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha		90%				90%	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Derah Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		100 kali	213.401.600,00		-	100 kali	141.783.000,00
34	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	20 kegiatan usaha	31.490.000,00	APBD dan DAK	-	25 kegiatan usaha	41.783.000,00
35	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	320 pelaku usaha	128.767.600,00	APBD dan DAK	-	450 pelaku usaha	50.000.000,00
36	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	125 kegiatan usaha	53.144.000,00	APBD dan DAK		125 kegiatan usaha	50.000.000,00
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal		5	3.104.500,00			5	14.401.000,00

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal		2%	3.104.500,00			2%	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi		3 jenis dokumen	3.104.500,00		-	3 jenis dokumen	14.401.000,00
37	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	3.104.500,00	APBD		1 dokumen	14.401.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut :

Table 15

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)	
					2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				14.382.552.970,29	15.752.504.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				14.382.552.970,29	15.752.504.000,00
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Rerata persentase capaian kinerja program	100%	12.947.455.713,29	14.168.447.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	45.360.000,00	80.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	31.219.800,00	50.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	14.140.400,00	30.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	9.959.530.655,29	10.030.000.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 orang/bulan	9.945.886.255,29	10.000.000.000,00

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	13.644.400,00	30.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	204.400.000,00	100.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	204.400.000,00	100.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	742.052.192,00	506.140.350,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	36.174.200,00	70.448.300,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	170.288.000,00	150.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	3 paket	52.920.000,00	52.920.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	42.546.900,00	42.546.900,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	6.723.600,00	6.723.600,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 laporan	318.109.192,00	100.211.103,00
	Dukungan pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	1 dokumen	115.290.300,00	83.290.447,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	1.667.329.600,00	2.251.435.800,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.958.200,00	7.758.200,00

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	448.034.400,00	943.677.600,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.217.400.000,00	1.300.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	328.783.266,00	1.200.870.850,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	38.556.700,00	42.370.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	13 unit	61.292.000,00	63.210.350,00
	Pemeliharaan Mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	2.380.800,00	5.555.200,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	40.858.900,00	57.597.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	175.573.566,00	1.008.146.700,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	10.121.300,00	23.991.600,00
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	6,00%	564.759.343,00	227.372.000,00
			Realisasi total terhadap target investasi	80%		
			Rasio investasi manufaktur terhadap total investasi masuk daerah	65%		
			Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,50%		

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	144.696.543,00	107.694.400,00
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	5.581.000,00	55.000.000,00
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 dokumen	45.286.009,00	26.549.079,00
	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 dokumen	93.829.534,00	26.145.321,00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	2 draft/ kajian	420.062.800,00	119.677.600,00
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	125.810.000,00	50.000.000,00
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	-	16.848.200,00	19.677.600,00
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 dokumen	277.404.600,00	50.000.000,00
	Program Promosi Penanaman Modal		Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	5,00%	356.702.800,00	401.353.000,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	356.702.800,00	401.353.000,00
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	325.087.600,00	350.000.000,00
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	31.615.200,00	51.353.000,00
	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase penyelesaian Izin	75%	297.065.814,00	799.148.000,00

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%		
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelayanan	5585 pelayanan	297.065.814,00	799.148.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 dokumen	38.543.200,00	109.828.755,00
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 pelaku usaha	66.708.000,00	300.000.000,00
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 pelaku usaha	186.822.614,00	339.319.245,00
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	25 pelaku usaha	4.992.000,00	50.000.000,00
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase kepatuhan Perusahaan dalam pelaporan LKPM	30%	213.401.600,00	141.783.000
			Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	90%		

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	100 kali	213.401.600,00	141.783.000
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	25 kegiatan usaha	31.490.000,00	41.788.000
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	450 pelaku usaha	128.767.600,00	50.000.000
	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	125 kegiatan usaha	53.144.000,00	50.000.000
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	5	3.104.500,00	14.401.000,00
			Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	2%	3.104.500,00	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis dokumen	3.104.500,00	14.401.000,00

*Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik Tahun 2026*

	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	3.104.500,00	14.401.000,00
--	---	--	--	-----------	--------------	---------------

BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan rencana kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ini, selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025;
2. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT);
3. Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun yang sama;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kegiatan dan program pembangunan dan dapat dihindari adanya kegiatan dan program yang keluar dari kesepakatan dalam Renja ini.



Gresik,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik

A.M Reza Pahlevi, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19740803 199311 1001